

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023**

 <p><b>PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>	 <p><b>PERATURAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>	 <p><b>PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersifat nasional yaitu Peringatan Upacara 17 Agustus di IKN dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Balikpapan, perlu dilakukan kegiatan renovasi pada Taman	Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja yang bersifat mendesak pada RSJD Atma Husada Mahakam, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pangan,

<p>2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Makam Pahlawan di Balikpapan;</p> <p>b. bahwa mengingat kegiatan tersebut di atas belum teranggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka untuk keperluan mendesak dimaksud, perlu dilakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 huruf a, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran</p>	<p>Ta.narnan Pangan, dan Hortikultura, Badan Penanacrulangan Bencana Daerah, Inspektorat, Dinas Perkebunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p>
--	---	---

	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>

<p>Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6781);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1781);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);</p>
---	--	--

	<p>Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 10);</p>	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan</p>

	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 47), diubah sebagai berikut:	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50), diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran berkenaan.</li> <li>5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.		
Pasal 2 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.	Pasal 2: Tetap	Pasal 2: Tetap
Pasal 3 Anggaran Pendapatan Daerah semula sebesar Rp14.621.856.687.106 bertambah sebesar Rp4.076.801.844.661 sehingga menjadi Rp18.698.658.531.767 yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan a. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.	Pasal 3: Tetap	Pasal 3: Tetap
Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp8.045.500.965.106 bertambah sebesar Rp1.200.473.833.740 sehingga menjadi Rp9.245.938.798.846 yang terdiri atas:	Pasal 4 Tetap	Pasal 4: Tetap

<p>a. pajak Daerah;</p> <p>b. retribusi Daerah;</p> <p>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>d. Lain-lain PAD yang sah.</p> <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.010.000.000.000 bertambah sebesar Rp729.500.000.000 sehingga menjadi Rp7.739.500.000.000.</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp20.052.388.240 berkurang sebesar Rp2.211.351.639 sehingga menjadi Rp17.841.036.601.</p> <p>(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp232.740.891.298 bertambah sebesar Rp16.998.036.585 sehingga menjadi Rp249.738.927.883.</p> <p>(1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp782.707.685.568 bertambah sebesar Rp456.151.148.795 sehingga menjadi Rp1.238.858.834.362.</p>		
<p>Pasal 5</p> <p>Pendapat transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>

<p>b semula sebesar Rp6.562.497.042.000 bertambah sebesar Rp2.807.209.530.921 sehingga menjadi Rp9.369.706.572.921 yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp13.858.680.000 bertambah sebesar Rp69.154.480.000 sehingga menjadi Rp83.013.160.000 yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan hibah; dan</li> <li>b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol> <p>(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.858.680.000 tidak bertambah.</p> <p>(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp69.154.480.000 sehingga menjadi Rp69.154.480.000.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Anggaran Belanja Daerah semula sebesar Rp17.031.194.223.080 bertambah sebesar Rp4.618.315.000.000 sehingga menjadi Rp21.649.509.223.080 yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Operasi;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>

<p>b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp7.414.552.277.521 bertambah sebesar Rp1.573.553.498.205 sehingga menjadi Rp8.988.105.775.726 yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja pegawai;</li> <li>b. belanja barang dan jasa;</li> <li>c. belanja hibah; dan</li> <li>d. belanja bantuan sosial.</li> </ol> <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.796.363.758.450 berkurang sebesar Rp15.341.496.908 sehingga menjadi Rp2.781.022.261.542.</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.207.685.257.571 bertambah sebesar Rp1.297.869.514.961 sehingga menjadi Rp5.505.554.772.532;</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp395.879.061.500 bertambah sebesar Rp291.025.480.152 sehingga menjadi Rp686.904.541.652;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8:</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a semula sebesar Rp8.988.105.775.726 bertambah sebesar Rp8.988.105.775.726 bertambah sebesar Rp455.115.000 sehingga menjadi Rp8.988.560.890.726 yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja pegawai;</li> <li>b. belanja barang dan jasa;</li> <li>c. belanja hibah; dan</li> <li>d. belanja bantuan sosial.</li> </ol> <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.781.022.261.542 bertambah sebesar Rp455.115.000 sehingga menjadi Rp2.781.477.376.542.</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.207.685.257.571 bertambah sebesar Rp1.297.869.514.961 sehingga</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8:</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp8.988.105.775.726 bertambah sebesar Rp546.725.003 sehingga menjadi Rp8.988.652.500.729, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja pegawai;</li> <li>b. belanja barang dan jasa;</li> <li>c. belanja hibah; dan</li> <li>d. belanja bantuan sosial.</li> </ol> <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.781.022.261.542 bertambah sebesar Rp546.725.003 sehingga menjadi Rp2.781.568.986.545.</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.207.685.257.571 bertambah sebesar Rp1.297.869.514.961 sehingga menjadi Rp5.505.554.772.532;</p>

<p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp14.624.200.000 tidak mengalami perubahan.</p>	<p>menjadi Rp5.505.554.772.532;</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp395.879.061.500 bertambah sebesar Rp291.025.480.152 sehingga menjadi Rp686.904.541.652;</p> <p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp14.624.200.000 tidak mengalami perubahan.</p>	<p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp395.879.061.500 bertambah sebesar Rp291.025.480.152 sehingga menjadi Rp686.904.541.652;</p> <p>(5) Bantuan belanja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp14.624.200.000 tidak mengalami perubahan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp4.097.300.945.741 bertambah sebesar Rp1.616.828.771.295 sehingga menjadi Rp5.714.129.717.036 yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja modal tanah;</li> <li>b. belanja modal peralatan dan mesin;</li> <li>c. belanja modal gedung dan bangunan;</li> <li>d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;</li> <li>e. belanja modal aset tetap lainnya; dan</li> <li>f. Belanja modal aset lainnya.</li> </ol> <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp194.076.151.439 bertambah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>

<p>sebesar Rp139.806.390.911 sehingga menjadi Rp333.882.542.350.</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.119.288.974.900 bertambah sebesar Rp745.216.841.368 sehingga menjadi Rp1.864.505.816.268.</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.346.857.444.001 bertambah sebesar Rp61.908.428.696 sehingga mmenjadi Rp1.408.765.872.697.</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.397.501.331.402 bertambah sebesar Rp658.854.929.092 sehingga menjadi Rp2.056.356.260.494.</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp10.568.681.228 sehingga Rp36.068.397.569;</p> <p>(1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp14.077.327.658 bertambah sebesar Rp473.500.000 sehingga menjadi Rp14.550.827.658.</p>		
--	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c semula sebesar Rp129.340.999.818 bertambah sebesar Rp252.360.152.500 sehingga menjadi Rp381.701.152.318.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c semula sebesar Rp381.701.152.318 bertambah sebesar Rp455.115.000 sehingga menjadi Rp381.246.037.318.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp381.701.152.318 berkurang sebesar Rp1.630.325.003 sehingga menjadi Rp380.070.827.315.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp5.390.000.000.000 bertambah sebesar Rp1.175.572.578.000 sehingga menjadi Rp6.565.572.578.000 yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja bagi hasil; dan</li> <li>b. belanja bantuan keuangan.</li> </ol> <p>(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.192.500.000.000 bertambah sebesar Rp1.175.572.578.000 sehingga menjadi Rp5.368.072.578.000;</p> <p>(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.197.500.000 tidak mengalami perubahan..</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp2.409.337.535.974 bertambah sebesar 541.513.115.339</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>

<p>sehingga menjadi Rp2.950.850.691.313, yang terdiri atas:</p> <p>a. penerimaan Pembiayaan; dan</p> <p>b. pengeluaran Pembiayaan.</p>		
<p>Pasal 13</p> <p>Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp2.578.143.312.894 bertambah sebesar Rp4.043.198.155.339 sehingga menjadi Rp6.621.341.468.233 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp168.805.776.920 bertambah sebesar Rp3.501.685.000.000 sehingga menjadi Rp3.670.490.776.920 yang terdiri atas penyetaraan modal Daerah.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula (Rp2.409.337.535.974) bertambah sebesar (Rp541.513.155.339) sehingga menjadi (Rp2.950.850.691.313).</p> <p>(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisish penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Tetap</p>

<p>sebesar Rp2.409.337.535.974 bertambah sebesar Rp541.513.115.339 sehingga menjadi Rp2.950.850.691.313.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;</li> <li>2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;</li> <li>3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap</p>

		Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;		
4.	Lampiran IV	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;		
5.	Lampiran V	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Keuangan;		
6.	Lampiran VI	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa;		
7.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan		

<p>8. Lampiran VIII</p>	<p>Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p>		
<p>9. Lampiran IX</p>	<p>Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,</p>		

<p>10. Lampiran X</p>	<p>Belanja dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.</p>		
<p>Pasal 17</p> <p>Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 18</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>			
		<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal</p>

	<p>tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	<p>ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>
<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 November 2023</p> <p>Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>Ttd</p> <p>AKMAL MALIK</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 November 2023</p> <p>Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>Ttd</p> <p>AKMAL MALIK</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 15 Desember 2023</p> <p>Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>Ttd</p> <p>AKMAL MALIK</p>
<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 19 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 50.</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 29 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 54.</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 15 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Ttd SRI WAHYUNI</p> <p>BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR 56.</p>